

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia*, Jakarta: Djambatan, 2008.
- _____, *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, Jakarta: Djambatan, 2003.
- Effendi Perangin, *Hukum Agraria di Indonesia (Suatu Telaah dari Sudut Pandang Praktisi Hukum)*, Cetakan ke-3, Jakarta: Rajawali, 1991.
- Habib Adjie, *Hak Tanggungan sebagai Lembaga Hak Jaminan Atas Tanah*, Bandung: CV Mandar Maju, 1999.
- Kartini Muljadi, Gunawan Widjaja, *Hak Tanggungan*, Jakarta: Kencana, 2005.
- Kartono, *Hak-Hak Jaminan Kredit*, Jakarta: Paramita, Jakarta: 1997.
- M. Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Jakarta : Sinar Grafika, 2006.
- Purwahid Patrik dan Kashadi, *Hukum Jaminan Edisi Revisi dengan UUHT*, Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, 2008.
- Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.
- Sutan Remy Sjahdeini, *Hak Tanggungan: Asas-Asas, Ketentuan-Ketentuan Pokok dan Masalah-Masalah yang di Hadapi oleh Perbankan*, Jakarta: Airlangga University Press, 1996.
- Urip Santoso, *Pendaftaran Tanah dan Peralihan Hak atas Tanah*, Jakarta: Kencana, 2011.
- _____, *Hukum Agraria Kajian Komprehensif*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Indonesia, *Undang-Undang Tentang Peraturan Dasar Pokok Indonesia*, UU No. 5 Tahun 1960, LN No. 104 Tahun 1960, TLN No.2043.
- _____, *Undang-Undang Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berakitan Dengan Tanah*, UU No. 4 Tahun 1996, LN No. 40 Tahun 1996, TLN No.3632.

_____, *Undang-Undang Tentang Penetapan Luas Lahan Pertanian*, UU No. 56 Tahun 1960, LN No. 67 Tahun 1960, TLN No.21 17.

Peraturan Pemerintah Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas Tanah, PP No. 40 tahun 1996, LN No. 58 Tahun 1996, TLN No.3643.

_____, *Tentang Pendaftaran Tanah*, PP No. 24 tahun 1997, LN No. 106 Tahun 1997, TLN No.3696.

Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertahanan Nasional Tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah Negara, Permen No. 3 tahun 1999.

_____, *Agraria/Kepala Badan Pertahanan Nasional Tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan*, Permen No. 9 tahun 1999.

Putusan Pengadilan Negeri Medan N0. 328/Pdt.G/2014/PN.MDN.